



SULTENG

JANUARY-DESEMBER 2025

LAPORAN

KINERJA

Prepared For :

**BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Senantiasa Kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Karena atas izin-Nya, Laporan Kinerja Pemerintah (LKj) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah ini merupakan amanat Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/37/AA.01/2025 perihal pemberitahuan penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKj) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat hasil pengukuran Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan Ukuran Capaian Kinerja SMART.

Demikian Lapotan Kinerja Pemerintah (LKj) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2025 disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi dan pembinaan implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Semoga ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingannya dan Petunjuknya kepada kita semua dalam menjalankan roda pemerintahan dan Pembangunan untuk kemajuan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 16 Januari 2026

**Pt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH**



MOHAMMAD AZIR, S.STP., M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 19770822 199511 1 001

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
1.3 Isu Strategis/Permasalahan	16
1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	28
2.2 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	31
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	35
2.4 Perjanjian Kinerja	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	40
3.1 Capaian Kinerja.....	42
a. Membandingkan antar target dan realisasi kinerja tahun ini;	
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	
c. Membandingkan raelisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	
d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/Daerah Lain;	
e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.	
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	
3.2 Realisasi Anggaran	54
3.3 Inovasi	55
3.4 Penghargaan	56
BAB IV PENUTUP	56
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah upaya pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang telah dicapai. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Maka dasar pelaksanaan itu merupakan bagian dari Implementasi SAKIP guna mendukung terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*)

Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan Informasi pencapaian Tujuan, Sasaran, dan Indikator kinerja yang telah tercapai.
2. Melaksanakan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kinerja biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun anggaran 2025 dapat dilihat dalam cascading sebagai berikut:

DUKUNGAN SDM DAN SARANA PRASARANA

DUKUNGAN SDM

Sumber Daya Manusia yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

A. Rekap Pegawai Per Jenis Kelamin

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1	PNS	16	19	35
2	PPPK	4	7	11
	TOTAL	20	26	46

B. Rekap Pegawai Per Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

No	GOLRU	JABATAN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1.	II/b	1		1
2.	II/c	-	-	-
3.	II/d	1	-	1
4.	III/a	2	1	3
5.	III/b	-	2	2
6.	III/c	2	6	8
7.	III/d	6	3	9
8.	IV/a	1	6	7
9.	IV/b	2	1	3
10.	IV/c	1		1
TOTAL		16	19	35

C. Rekap Pegawai Per Pendidikan Dan Jenis Kelamin

NO	PDDKN	JENIS KELAMIN				JMLH
		PRIA	%	WANITA	%	
1	SD					0
2	SMP					0
3	SMA/SMK	2		1		3
4	D.I					0
5	D.II					0
6	D.III			1		1
7	S1 / D.IV	7		7		14
8	S2	6		10		16
9	S3	1				1
TOTAL		16	0	19	0	35

D. Rekap Jabatan Struktural (Eselon)

NO	ESS	FORMASI	TERISI	LOWONG
1.	I.b			0
2.	II.a			0
3.	II.b	1	1	0
4.	III.a	3	3	0
5.	III.b			0
6.	IV.a	9	9	0
7.	IV.b			0
TOTAL		13	13	0

E. Pejabat Struktural Per Jenis Kelamin

NO	ESS	PRIA	WANITA	JUMLAH
1.	II.b	1		1
2.	II.c	-	-	-
3.	III.a	2	1	3
4.	III.b	-	-	-
5.	III.c			
6.	IV.a	2	7	9
TOTAL		5	8	13

F. Rekap Pendidikan Pejabat Struktural

NO	PDDKN	ESELON				JMLH
		I	II	III	IV	
1	SMA/SMK					0
2	D.I - D.III					0
3	S1 / D.IV				3	3
4	S2		1	3	6	10
5	S3					0
TOTAL		0	1	3	9	13

SARANA PRASARANA

Dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan, adanya sarana dan prasarana tentunya sangat membantu kelancaran serta efisiensi proses. Pada dasarnya fungsi dari sarana prasarana bergantung pada penggunaan dan bidangnya.

Artinya antara bidang yang satu dengan lainnya, akan membutuhkan sarana dan prasarana yang berbeda. Contoh kebutuhan sarana dan prasarana di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, tentunya berbeda dengan transportasi dan Kesehatan.

Secara Umum, Sarana dan Prasarana mempunyai empat fungsi utama, yakni :

1. Mempermudah proses pekerjaan
Sarana dan Prasarana berfungsi untuk mempermudah proses kegiatan, supaya tujuan bersama dapat tercapai
2. Mempercepat proses kerja
Selain mempermudah, adanya sarana dan prasarana juga mempercepat proses kerja suatu organisasi atau lembaga
3. Meningkatkan produktivitas
Produktivitas kegiatan karena terbantu oleh adanya sarana dan prasarana
4. Hasilnya lebih berkualitas oleh karena produktivitas meningkat, hasil kerja juga lebih berkualitas. Karena adanya sarana dan prasarana dapat mempermudah serta mempercepat proses kerja.

NO	NAMA BARANG/JENIS	MERK/TYPE	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	KENDARAAN RODA 4	innova, Rush	4	Unit	baik
2	KENDARAAN RODA 2	Honda, Suzuki, Yamha	22	Unit	baik
3	Komputer	Lenovo, Acer dan Apple	12	Unit	Baik
4	Laptop	Asus, Toshiba, Acer dan Lenovo	25	Unit	Baik
5	Note Book/Tablet	Apple dan	8	Unit	Baik

		Samsung			
6	LCD/PROYECTOR	EPSON	2	Unit	baik
7	PINTER	EPSON	8	Unit	baik
8	AC	Gree, SHARP, Polytron	14	Unit	baik
9	Kamera	SONY dan NIKON	2	Unit	baik
10	TV LED	SHARP	1	Unit	baik
11	KULKAS	POLYTRON	2	Unit	baik
12	Brangkas	Tiger	2	Unit	baik
13	Kursi	CHITOSE, Ichiko, Indachi, Frontline	78	Unit	baik
14	Meja	kayu	60	Unit	baik
15	Scanner	EPSON	1	Unit	baik

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRATEGIS ORGANISASI

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah. Maka Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai dasar pembentukan dan susunan OPD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari Biro Administrasi Wilayah Daerah Pemerintahan berganti nama menjadi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berkedudukan di bawah pembinaan dan koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Kepala Biro.

Adapun Rincian Tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 pasal 2 adalah sebagai berikut

TUGAS

Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama.

FUNGSI

- Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Biro dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pembinaan, perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, supervisi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha.

Fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

A. SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FASILITASI PENATAAN WILAYAH

Tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan perencanaan, pembinaan, pengoordinasian, supervisi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pembentukan, pemecahan, pengabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah, perubahan nama dan pemindahan ibukota;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kodifikasi dan data wilayah administrasi pemerintah;
- c. menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, batas wilayah, toponimi/rupe bumi;
- d. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan yang dilaksanakan kabupaten/kota;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota;
- f. menyiapkan bahan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing;
- g. menyiapkan bahan analisis data tentang pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemerintah mengenai tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- i. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (IPPD) perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota;
- j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam Forum pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan pengembangan teknis administrasi pertanahan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan, penetapan, penentuan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pertanahan;
- l. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sub bagian pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

B. SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan perumusan kebijakan, pembinaan, pengkoordinasian, supervisi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pemerintahan umum;
- b. menyiapkan bahan supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemerintah mengenai tugas pemerintahan umum;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi dan workshop penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- g. melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPM provinsi dan kabupaten/ kota;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan kawasan khusus bencana, kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban;
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sub bagian pemerintahan umum; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

C. SUB BAGIAN TATA USAHA

Tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan ANJAB, SOP, RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro pemerintahan dan otonomi daerah;
- g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;

- i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

2. KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pembinaan, perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, supervisi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya

A. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD

Tugas :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- c. Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan mengenai administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- d. Menyiapkan bahan analisis data administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi administrasi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi izin ke luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alasan penting;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi izin ke luar negeri bagi anggota/pimpinan DPRD dengan alasan penting;
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sub bagian administrasi kepala daerah dan DPRD; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

B. SUB BAGIAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH DAN PENATAAN URUSAN

Tugas:

- a. Menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan pengembangan dibidang pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan otonomi daerah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan otonomi daerah;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis pemetaan urusan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan otonomi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sub bagian pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

C. SUB BAGIAN EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas daerah;
- b. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Menyiapkan bahan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dan Peningkatan Kapasitas Daerah;
- e. Menyiapkan bahan pengolahan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah skala Daerah;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan bahan evaluasi kinerja penyelenggaran Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan penetapan perencanaan pengembangan kapasitas Daerah;
- h. Menyiapkan bahan penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas Daerah;
- i. Menyiapkan bahan implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas Daerah;
- j. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas Kabupaten/Kota; dan
- k. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas daerah dalam rangka peningkatan daya saing.

3. BAGIAN KERJA SAMA

Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pembinaan, perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, supervisi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- d. penyiapan bahan supervisi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

A. SUB BAGIAN KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH

Tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan, mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerjasama antar daerah;
- b. Menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana program Kerjasama antar Daerah;
- c. melaksanakan, fasilitasi, sosialisasi, workshop, orientasi tugas dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan untuk forum kerjasama daerah;
- d. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama antar daerah;
- e. melaksanakan pembinaan dan sistem pengendalian intern;
- f. memfasilitasi penyusunan draf kerjasama Luar Negeri;
- g. mempersiapkan data potensi daerah dalam rangka Kerjasama Luar Negeri skala provinsi;
- h. menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana program kerjasama Luar Negeri;
- i. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama luar negeri;
- j. mengelola administrasi ijin ASN Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Negeri;
- k. mengkaji laporan perjalanan dinas luar negeri yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

B. SUB BAGIAN KERJA SAMA BADAN USAHA/SWASTA

Tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan dan mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerjasama Badan Usaha / Swasta /pihak ketiga;
- b. menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana program Kerjasama Badan Usaha / Swasta /pihak ketiga;
- c. melaksanakan, fasilitasi, sosialisasi, workshop, orientasi tugas dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan untuk forum kerjasama daerah;
- d. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama Badan Usaha/ Swasta /pihak ketiga;
- e. memfasilitasi kerjasama Pemerintah Provinsi dengan badan usaha;
- f. melakukan penyusunan data base kerjasama antara pemerintah daerah dengan Badan Usaha/Swasta/pihak ketiga;

- g. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama Badan Usaha/Swasta/pihak ketiga;
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sub bagian pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

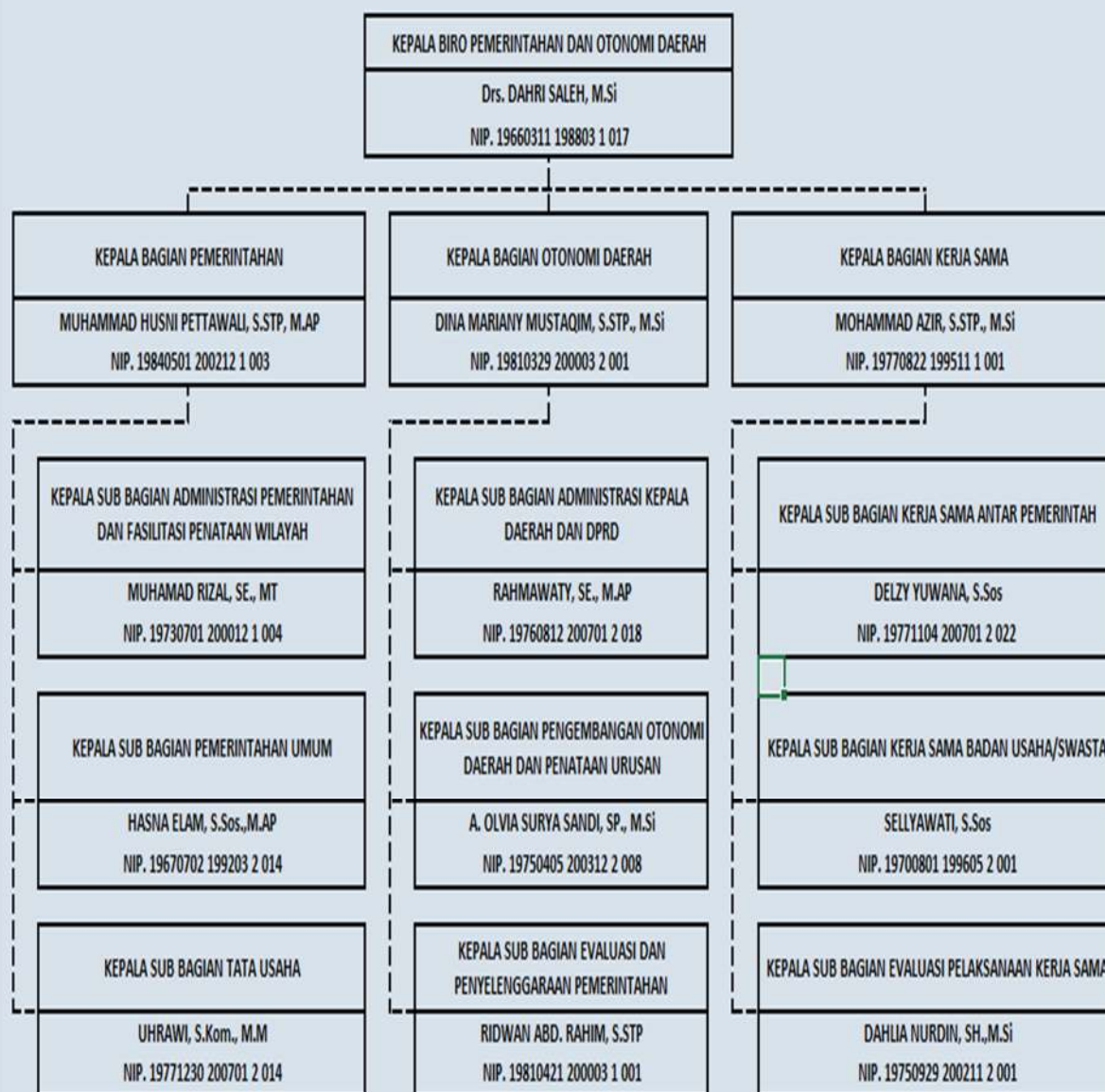
C. SUB BAGIAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA

Tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta;
- c. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta;
- d. melaksanakan supervisi, sosialisasi, workshop pelaksanaan tugas evaluasi sub bagian evaluasi pelaksanaan kerjasama;
- e. melaksanakan pembinaan evaluasi penyelenggaraan kerjasama wajib kabupaten/kota;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sub bagian evaluasi pelaksanaan kerjasama; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

SRUKTUR ORGANISASI

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH



1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat beberapa isu strategis yang dapat dijadikan sebagai focus perhatian dalam penetapan sasaran strategis yang diwujudkan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

- a. Belum adanya rencana aksi kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sulawesi Tengah sehingga menyebabkan penyusunan anggaran tahunan untuk kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini tidak sesuai dengan RENSTRA.
- b. Dalam rangka Penataan Wilayah yang berbentuk Pemekaran Wilayah Kecamatan untuk tahun 2025 di beberapa Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kendala yaitu persyaratan teknis berupa belum adanya penegasan batas desa dan batas kelurahan.
- c. Terhambatnya proses PAW yang diberhentikan dari partai politiknya beserta gugatannya
- d. Validasi Data P3D 13 Kabupaten/Kota
- e. Kualitas Penyusunan Laporan LPPD

1.4 Tindakan Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akip Tahun 2025

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun Hasil Evaluasi Akuntabilitas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2025 Nomor : 700.1.2.1/068/LHE-AKIP/PROV/IRBAN3/2025 tanggal 26 Mei 2025 memperoleh nilai sebesar **79.85** sehingga mendapat predikat **BB (nilai>70-80)**. Hal tersebut menunjukkan bahwa **Sangat Baik**, maka dalam hal ini Laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dalam Format Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025:

MATRIKS TINDAK LANJUT LHE AKIP INTERNAL
BIRO PMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

NO	REKOMENDASI LHE	RENCANA TINDAK LANJUT	PROGRES PELAKSANAAN	KENDALA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT	LINK
a	Memplukasikan Dokumen perencanaan Kinerja (Renstra, Renja OPD, dan Perjanjian Kinerja) di Website yang dapat diakses	Unggah dokumen Renstra, Renja OPD, dan Perjanjian Kinerja ke website resmi dan Masing-masing Bagian Pemerintah, Kerjasama, dan Otonomi Daerah) menyusun dan menyerahkan dokumen kinerja ke Subbag Perencanaan untuk dipublikasikan ke laman resmi Biro	Pembuatan Website untuk Publikasi Kinerja Biro	Belum ada Website Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, di sebabkan kendala Anggaran belum tersedia	https://drive.google.com/drive/folders/1R0FomBNu6MuO867Nz6mXJ7Q6lkcQXq3J?usp=sharing
b	Menyempurnakan perjanjian kinerja yang dilaksanakan sehingga ada keselarasan antar pernjajian kinerja antar Renstra, Renja, LKJIP dan Perjanjian Kinerja yang diformalkan	"Penyesuaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024" telah diselaraskan dengan Dokumen Renstra, Renja, dan LKJIP.	Melakukan Revisi awal yang telah dilakukan bersama seluruh bidang	Belum semua bidang paham teknis penyalarsan antar dokumen dan Proses formal melalui atasan belum selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1R0FomBNu6MuO867Nz6mXJ7Q6lkcQXq3J?usp=sharing
c	Memastikan Pelaksanaan rencana aksi di pantau secara berkala	Pembuatan Rencana Aksi dan di pantau secara berkala	Monitoring Telah dilakukan berjenjang.	Belum semua Bidang disiplin dalam menyampaikan laporan tepat waktu.	https://drive.google.com/drive/folders/1R0FomBNu6MuO867Nz6mXJ7Q6lkcQXq3J?usp=sharing
d	Menyusun SOP Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja yang up to date	Pembuatan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja yang Up To Date	diterapkan Pengukuran dan Pengumpulan data Kinerja pada Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Sistem Operasional Prosedur (SOP).	Kurangnya Pemahaman Pengukuran dan Pengumpulan data Kinerja pada Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Sistem Operasional Prosedur (SOP).	https://drive.google.com/drive/folders/1R0FomBNu6MuO867Nz6mXJ7Q6lkcQXq3J?usp=sharing
e	Melakukan Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berjenjang	Terlaksananya Pemantauan pengukuran capaian kinerja pada Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024	Penerapan Progres seluruh Kinerja Bidang dan sub bagian dilaporkan berjenjang Melalui Sistem "Berani Selaras" (dalam Proses)	Belum semua Bidang disiplin dalam menyampaikan laporan tepat waktu.	https://drive.google.com/drive/folders/1R0FomBNu6MuO867Nz6mXJ7Q6lkcQXq3J?usp=sharing
f	Memfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran capaian kinerja	Mengoptimalkan penggunaan Google Form/Sheet/Drive atau aplikasi sederhana untuk input dan rekap kinerja kemudian Integrasi aplikasi e-Kinerja atau sistem pemantauan digital lainnya dan Setiap staf fungsional atau pelaksana diminta menyampaikan laporan kegiatan bulanan ke Kepala Bidang, lalu direkap untuk evaluasi kinerja Biro.	Penerapan Progres seluruh Kinerja Bidang dan sub bagian dilaporkan berjenjang Melalui Sistem "Berani Selaras" (dalam Proses)	Belum semua Bidang disiplin dalam menyampaikan laporan tepat waktu.	https://drive.google.com/drive/folders/1R0FomBNu6MuO867Nz6mXJ7Q6lkcQXq3J?usp=sharing
g	Mendokumentasikan kegiatan monitoring setiap triwulan untuk dapat melihat capaian kinerja secara berkala melalui Berita Acara Monev, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi kegiatan	Membuat dokumentasi lengkap (Berita Acara, Notulen, Daftar Hadir) setiap kegiatan evaluasi triwulan dan Menyusun format standar Berita Acara, Daftar Hadir, dan Notulen monitoring.	Sudah ada Dokumentasi untuk pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja	Keterlambatan dalam Pengumpulan Dokumen Serta Dokumen Tidak Memenuhi Standar karena koordinasi yang belum optimal	https://drive.google.com/drive/folders/1R0FomBNu6MuO867Nz6mXJ7Q6lkcQXq3J?usp=sharing
h	Melakukan Pemantauan atas capaian secara berjenjang	Terlaksananya Pemantauan pengukuran capaian kinerja pada Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024	Penerapan Progres seluruh Kinerja Bidang dan sub bagian dilaporkan berjenjang Melalui Sistem "Berani Selaras" (dalam Proses)	Belum semua Bidang disiplin dalam menyampaikan laporan tepat waktu.	https://drive.google.com/drive/folders/1R0FomBNu6MuO867Nz6mXJ7Q6lkcQXq3J?usp=sharing
i	Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan membuat berita acara hasil tindak lanjut hasil rekomendasi LHE APIP yang sesuai Peraturan perundang yang berlaku	Telah ditindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan membuat berita acara hasil tindak lanjut hasil rekomendasi LHE APIP yang sesuai Peraturan perundang yang berlaku	Telah dilaksanakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan membuat berita acara hasil tindak lanjut hasil rekomendasi LHE APIP yang sesuai Peraturan perundang yang berlaku.	Seluruh Bidang baru memahami hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	https://drive.google.com/drive/folders/1R0FomBNu6MuO867Nz6mXJ7Q6lkcQXq3J?usp=sharing

Berdasarkan Tindak Lanjut tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah juga terus melakukan upaya perbaikan dengan Dokumen Perencanaan, Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja, Penguatan Evaluasi Kinerja Internal, serta Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

Maka Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 telah dan akan terus dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan Kualitas implementasi SAKIP serta mendorong terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang lebih Efektif, Efisien dan Berorientasi hasil pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai perencanaan kinerja yang akan dicapai pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2025-2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mencakup visi, misi prioritas daerah, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

VISI Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025- 2029 berdasarkan RPJMD adalah:

“BERANI MEWUJUDKAN SULAWESI TENGAH SEBAGAI WILAYAH PERTANIAN DAN INDUSTRI YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN 2025-2029”

Adapun Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas pada Program Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam Rencana Aksi yang merupakan Sasaran Strategis dalam Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah diturunkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sasaran tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang ditandai dengan :

Perumusan Tujuan dan Sasaran dan Indikator adalah upaya untuk mencapai visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah. Adapun tujuan, sasaran dan indikator sebagai berikut:

TUJUAN :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas.

SASARAN :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah

INDIKATOR KINERJA

1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2025									
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	78	80	88,50	90	92
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Nilai LPPD Provinsi	Nilai	3,1145	3,1300	3,1670	3,2500	3,3531
			Persentase Capaian SPM	Persen	90,63	90,63	90,65	90,68	90,71
2	Terfasilitasinya Pembentukan Daerah Persiapan/DOB	Meningkatnya Kualitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)	Persentase Usulan Kajian Akademik DOB	Persen	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Kerja Sama Antar Daerah	Meningkatnya Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100

Tabel 4.1 pada RENSTRA tersebut menggambarkan **tujuan, sasaran, indikator, serta target kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk periode 2022–2026**. Tujuan pertama adalah **terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas, akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan**. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang diukur melalui **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dengan target meningkat dari **78 pada tahun 2022 menjadi 92 pada tahun 2026**. Selain itu, sasaran lain adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas yang diukur melalui **Nilai LPPD Provinsi**, yang ditargetkan meningkat dari **3,1145 pada tahun 2022 menjadi 3,3531 pada tahun 2026**. Kinerja ini juga didukung oleh indikator **Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)** yang menunjukkan tren peningkatan dari **90,63 persen pada tahun 2022 menjadi 90,71 persen pada tahun 2026**.

Selanjutnya, tujuan kedua adalah **terfasilitasinya pembentukan daerah persiapan atau Daerah Otonomi Baru (DOB)**. Sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kualitas usulan kajian daerah otonomi baru yang diukur melalui **persentase usulan kajian akademik DOB**, dengan target capaian **100 persen setiap tahun selama periode 2022–2026**. Tujuan ketiga adalah **meningkatnya kerja sama antar daerah**, dengan sasaran meningkatnya kerja sama daerah yang diukur melalui **persentase kerja sama yang ditindaklanjuti**, yang juga ditargetkan mencapai **100 persen setiap tahun**. Secara keseluruhan, target-target tersebut menunjukkan komitmen Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi antar daerah, serta mendukung proses pembentukan daerah otonomi baru secara optimal.

Tabel 4.1										
Tujuan, Sasaran, strategi dan Arah Kebijakan										
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah										
TAHUN 2025-2030										
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran RPJMD :	Tujuan Renstra :									
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			Indeks Reformasi Birokrasi General	70	73	76	79	82	85
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		Nilai LPPD	3,2053	3,2127	3,2349	3,2405	3,2553	3,4512
			Meningkatnya kualitas Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah	Persentas Pemenuhan Kualitas Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Capaian SPM	Persentase Capaian Bidang Urusan SPM	91	92	92	93	94	95
			Meningkatnya Kepemimpinan daerah dalam melakukan Kolaborasi	Nilai Indikator Kolaboratif untuk Kemajuan Daerah	75	78	81	84	87	91

Tabel 4.1 RENSTRA menggambarkan **tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 2026–2029** yang diselaraskan dengan sasaran RPJMD. Sasaran utama yang ingin dicapai adalah **terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas**. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, ditetapkan tujuan Renstra yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah. Pencapaian tujuan ini diukur melalui beberapa indikator kinerja, salah satunya **Indeks Reformasi Birokrasi General** yang ditargetkan meningkat secara bertahap dari **70 pada tahun 2025 menjadi 85 pada tahun 2030**. Selain itu, indikator **Nilai LPPD** juga ditargetkan mengalami peningkatan dari **3,2053 pada tahun 2025 menjadi 3,4512 pada tahun 2030**, sebagai wujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran strategis, antara lain **meningkatnya kualitas penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah** yang diukur melalui **persentase pemenuhan kualitas penyusunan LPPD** dengan target **100 persen setiap tahun**. Sasaran berikutnya adalah **meningkatnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)** yang diukur melalui **persentase capaian bidang urusan SPM**, dengan target meningkat dari **91 persen pada tahun 2025 menjadi 95 persen pada tahun 2030**. Selain itu, terdapat sasaran **meningkatnya kepemimpinan daerah dalam melakukan kolaborasi**, yang diukur melalui **nilai indikator kolaboratif untuk kemajuan daerah**, dengan target meningkat dari **75 pada tahun 2025 menjadi 91 pada tahun 2030**. Secara keseluruhan, target-target tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.2 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang pemerintahan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Tengah menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas Misi kedua, ketujuh dan kesembilan RPJMD 2025 – 2029

Renstra merupakan suatu proses yang menyajikan rencana-rencana strategis organisasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis ini sebagai implementasi RPJMD di tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Isu-isu strategis di tingkat SKPD dianalisis untuk menemukan strategi yang efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada tahap akhir, pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) oleh pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Secara keseluruhan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 telah mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029. Renstra Biro Pemerintahan telah mengakomodir keseluruhan program prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD tahun 2025- 2029,

Adapun Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Melaksanakan 2 (dua) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 16 (tujuh belas) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp 5.852.500.000** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.3.1

Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Teknis

Terkait Langsung Pencapaian Sasaran 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1.611.079.055	1.263.806.100	- 347.272.955	Berkurang
		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	281.015.805	190.777.850	- 90.237.955	Berkurang
		Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	67.302.105	48.300.000	- 19.002.105	Berkurang
	Meningkatnya Kaulitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	136.183.700	66.757.850	- 69.425.850	Berkurang
		Fasilitasi Penataan Wilayah	77.530.000	75.720.000	- 1.810.000	Berkurang
		Pelaksanaan Otonomi Daerah	288.608.100	222.985.000	- 65.623.100	Berkurang
		Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	81.013.000	39.176.000	- 41.837.000	Berkurang
	Meningkatnya Kualitas Capaian SPM	Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	95.403.100	43.270.000	- 52.133.100	Berkurang
		Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	112.192.000	140.539.000	28.347.000	Bertambah
	Meningkatnya Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.041.455.150	850.043.250	- 191.411.900	Berkurang
		Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	849.100.850	708.661.450	- 140.439.400	Berkurang
		Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	95.544.800	49.307.350	- 46.237.450	Berkurang
		Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	96.809.500	92.074.450	- 4.735.050	Berkurang

Tabel. 2.3.2

Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pendukung Pencapaian Sasaran 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.882.476.446	1.587.920.923	- 294.555.523	Bertambah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.276.129	34.358.424	- 31.917.705	Berkurang
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.676.245	19.683.424	- 16.992.821	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.299.884	9.875.000	- 9.424.884	Berkurang
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.300.000	4.800.000	- 5.500.000	Bertambah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	643.310.317	565.765.249	- 77.545.068	Bertambah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	183.500.617	106.803.249	- 76.697.368	Bertambah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	459.809.700	458.962.000	- 847.700	Bertambah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798.520.000	677.125.000	- 121.395.000	Berkurang
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	798.520.000	677.125.000	- 121.395.000	Berkurang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.370.000	310.672.250	- 63.697.750	Berkurang
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	374.370.000	310.672.250	- 63.697.750	Berkurang

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah ” Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah” yang merupakan tugas dan fungsi utama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pembinaan, pengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama. Maka Indikator kinerja ditetapkan untuk melihat capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan utama yang ditetapkan dalam Renstra Setda. Indikator kinerja utama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang disajikan pada Tabel 2.4.1 di bawah ini :

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTNOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2025**

No.	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET KINERJA TAHUN 2025	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	3	4		4		5
1	Meningkatnya kualitas Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah	Persentas Pemenuhan Kualitas Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Penjelasan pada pemenuhan data penyusunan Kualitas LPPD Provinsi Sulawesi Tengah maka Biro Pemerintahan dan OTDA Melakukan Verifikasi Data Seluruh OPD Prov.Sulteng yang Keabsaan Datanya Valid Formulasi Penilaian Data tersebut menentukan beberapa Indikator : 1. Ketepatan Waktu 2. Sistimatika Penyusunan 3. Pemenuhan Data 4. Keabsaan Data (Validasi Data)	Biro Pemerintahan dan Otda	Biro Pemerintahan dan Otda
2	Meningkatnya Capaian SPM	Persentase Capaian Bidang Urusan SPM	91%	Penjelasan PM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal. Bidang urusan SPM meliputi 6 sektor: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum dan 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 6. Sosial Formulasi Menggambarkan rasio antara jumlah penduduk yang telah mendapatkan pelayanan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya mendapatkan pelayanan tersebut. Persentase Capaian Bidang Urusan SPM merupakan instrumen evaluasi yang menunjukkan seberapa jauh Pemerintah Daerah mampu menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai standar yang telah ditetapkan Pengukuran yang dibuat Biro Pemerintahan dan OTDA berdasarkan Persentase (%)	OPD PROVINSI SULAWESI TENGAH	Biro Pemerintahan dan Otda
3	Meningkatnya Kepemimpinan daerah dalam melakukan Kolaborasi	Nilai Indikator Kolaboratif untuk Kemajuan Daerah	75	Penjelasan Nilai Indikator Kolaboratif adalah ukuran kinerja yang menggambarkan sejauh mana Pemerintah Daerah mampu membangun kerja sama, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka mendorong pembangunan dan kemajuan daerah. Kolaborasi ini bisa dilakukan dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, swasta, akademisi, komunitas, maupun masyarakat (pentahelix). Semakin tinggi nilai indikator kolaboratif, berarti semakin baik kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi eksternal untuk mempercepat pembangunan. Formulasi Pada Nilai Kolaboratif Kemajuan Daerah Berdasarkan Persentase/Nilai Skor Sebagai Berikut : Nilai Indikator Kolaboratif= Capaian Kolaborasi/Target Kolaborasi X 100%	Biro Pemerintahan dan Otda	Biro Pemerintahan dan Otda

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi kinerja aparatur. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah membuat PK sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi, Renstra 2025- 2029, ketersediaan anggaran sebagaimana yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2025, serta mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disusun berdasarkan target dan kinerja yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk rumusan Perjanjian Kinerja (PK) setingkat Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Eselon II)

Perjanjian Kinerja Awal adalah dokumen resmi yang berisi kesepakatan antara atasan dan bawahan mengenai target kinerja yang harus dicapai dalam satu periode (biasanya 1 tahun). Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuannya adalah sebagai pedoman kerja, alat ukur keberhasilan, serta bentuk akuntabilitas kinerja instansi atau pegawai. Sedangkan **Perjanjian Kinerja Perubahan** revisi atau penyesuaian dari Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan ini dilakukan apabila terdapat kondisi tertentu, seperti perubahan anggaran, sasaran strategis, Indikator Kinerja Perubahan kebijakan, prioritas program, atau situasi yang tidak terduga. Dokumen ini tetap berfungsi sebagai acuan kerja, namun sudah disesuaikan agar lebih relevan dengan kondisi terbaru. Tabel Lampiran Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **Drs. DAHRI SALEH, M.Si**
J a b a t a n : **Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **Dra. NOVALINA, MM**
J a b a t a n : **Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan mencapai target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian Dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dra. NOVALINA, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19690927 198811 2 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Drs. DAHRI SALEH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19660311 198803 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

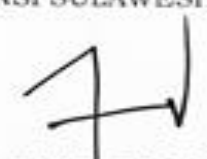
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- NILAI KINERJA LPPD	3,40
2	MENINGKATNYA CAPAIAN SPM	- PRESENTASE DATA CAPAIAN SPM	96,00 %
3	MENINGKATNYA KUALITAS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH	- NILAI VARIABEL KINERJA KEPALA DAERAH DALAM INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH	60-79 %
4	MENINGKATNYA KEPEMIMPINAN DAERAH DALAM MELAKUKAN KOLABORASI	- NILAI INDIKATOR KOLABORATIF UNTUK KEMAJUAN DAERAH	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Rp. 1.888.920.945
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Rp. 1.611.079.055
JUMLAH		Rp. 3.500.000.000

PIHAK KEDUA
 SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dra. NOVALINA, MM
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19690927 198811 2 001

PIHAK PERTAMA
 KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
 DAN OTONOMI DAERAH
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. DAHRI SALEH, M.Si
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19660311 198803 1 017



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Drs. DAHRI SALEH, M.Si**
Jabatan : **Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dra. NOVALINA, MM**
Jabatan : **Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA berjanji akan

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan mencapai target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian Dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

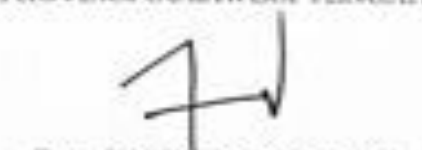
Pada,

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dra. NOVALINA, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19690927 198811 2 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. DAHRI SALEH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19660311 198803 1 017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	MENINGKATNYA KUALITAS PENYUSUNAN LPPD PROVINSI SULAWESI TENGAH	PERSENTASE PEMENUHAN KUALITAS PENYUSUNAN LPPD PROVINSI SULAWESI TENGAH	PERSEN	100
2	MENINGKATNYA CAPAIAN SPM	PERSENTASE CAPAIAN BIDANG URUSAN SPM	PERSEN	91
3	MENINGKATNYA KEPEMFINAN DAERAH DALAM MELAKUKAN KOLABORASI	NILAI INDIKATOR KOLABORATIF UNTUK KEMAJUAN DAERAH	NILAI	75

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Rp. 1.591.143.172
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Rp. 1.263.806.100
	JUMLAH	Rp. 2.854.949.272

PIHAK KEDUA
 SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dra. NOVALINA, MM
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19690927 198811 2 001

PIHAK PERTAMA
 KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
 DAN OTONOMI DAERAH
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. DAHRI SALEH, M.Si
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19660311 198803 1 017

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan elemen krusial dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip perencanaan yang terukur, monitoring dan evaluasi yang sistematis, serta keterbukaan informasi, instansi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kepercayaan publik. Melalui pendekatan yang holistik dan perbaikan berkelanjutan, tantangan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dapat diatasi, sehingga pada akhirnya tercipta pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas,

Maka perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui pembandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang disampaikan dengan akhir tahun 2025 dalam Perjanjian Kinerja Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2025 serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui inovasi. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Tengah dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Baik
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

Pada Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan yang telah direncanakan. Pencapaian target dari suatu kegiatan merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah perencanaan yang baik, karena suatu proses tanpa adanya sebuah target bagaikan berjalan tanpa arah. Maka dari itu sebelum pelaksanaan suatu kegiatan harus ditentukan dahulu target yang akan dicapai

Tabel. 3.1							
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025							
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET TAHUN 2026
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	
1	Meningkatnya kualitas Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah	Persentas Pemenuhan Kualitas Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah	NILAI	100	100	100%	100
2	Meningkatnya Capaian SPM	Persentase Capaian Bidang Urusan	%	91%	99,50%	109%	92
3	Meningkatnya Kepemimpinan daerah dalam melakukan Kolaborasi	Nilai Indikator Kolaboratif untuk Kemajuan Daerah	%	75	75	100%	78

Berdasarkan **Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025**, dapat dijelaskan bahwa kinerja pada beberapa sasaran strategis menunjukkan hasil yang sangat baik dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Pada sasaran pertama yaitu *meningkatnya kualitas penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah*, indikator kinerja berupa persentase pemenuhan kualitas penyusunan LPPD berhasil mencapai realisasi **100%** dari target **100%**, sehingga capaian kinerjanya juga **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan LPPD telah dilaksanakan secara optimal sesuai standar yang ditetapkan.

Selanjutnya, pada sasaran kedua yaitu *meningkatnya capaian SPM*, indikator persentase capaian bidang urusan menunjukkan realisasi **99,50%**, yang melampaui target awal sebesar **91%**. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai **109%**, yang menandakan bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal telah berjalan sangat efektif dan mampu melebihi target yang direncanakan.

Sementara itu, pada sasaran ketiga yaitu *meningkatnya kepemimpinan daerah dalam melakukan kolaborasi*, indikator nilai kolaboratif untuk kemajuan daerah mencapai realisasi **75%**, sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu **75%**, sehingga capaian kinerjanya mencapai **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penguatan kepemimpinan daerah dalam membangun kolaborasi untuk mendukung kemajuan daerah telah berjalan sesuai dengan perencanaan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, sehingga dapat menjadi dasar yang baik untuk peningkatan target kinerja pada tahun **2026** yang akan datang.

A. PERBANDINGAN ANTAR TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

3.1.1

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya kualitas Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah	Persentas Pemenuhan Kualitas Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah	100	100	100%
2	Meningkatnya Capaian SPM	Persentase Capaian Bidang Urusan SPM	91%	99,50%	109%
3	Meningkatnya Kepemimpinan daerah dalam melakukan Kolaborasi	Nilai Indikator Kolaboratif untuk Kemajuan Daerah	75	75	100%

Berdasarkan **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**, dapat dijelaskan bahwa secara umum capaian kinerja telah memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Pada sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah, indikator kinerja berupa persentase pemenuhan kualitas penyusunan LPPD menunjukkan realisasi sebesar **100** dari target **100**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan LPPD telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan standar dan target yang telah ditentukan.

Selanjutnya, pada sasaran kedua yaitu meningkatnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator persentase capaian bidang urusan SPM menunjukkan realisasi sebesar **99,50%**, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu **91%**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai **109%**, yang menandakan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan SPM di daerah berjalan sangat baik serta melebihi target yang direncanakan.

Sementara itu, pada sasaran ketiga yaitu meningkatnya kepemimpinan daerah dalam melakukan kolaborasi, indikator nilai kolaboratif untuk kemajuan daerah menunjukkan realisasi sebesar **75** dari target **75**, sehingga capaian kinerja mencapai **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa

upaya penguatan kepemimpinan daerah dalam mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja telah tercapai dengan baik, bahkan pada beberapa indikator mampu melampaui target yang direncanakan, sehingga mencerminkan kinerja yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

B. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Tabel 3.1.2

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Capaian SPM	Persentase Data Capaian SPM	90,63	90,52	100%	90,65	56,52	62%	91%	99,50%	109%
2	Meningkatnya kualitas Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah	Persentas Pemenuhan Kualitas Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
3	Meningkatnya Kepemimpinan daerah dalam melakukan Kolaborasi	Nilai Indikator Kolaboratif untuk Kemajuan Daerah	100	100	100%	100	100	100%	75	75	100%

Berdasarkan **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya**, dapat diketahui perkembangan capaian kinerja pada beberapa sasaran strategis dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2025. Pada sasaran **meningkatnya kualitas pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat**, capaian pada tahun 2023 menunjukkan realisasi sebesar **88,56** dari target **80** dengan capaian

111%, kemudian pada tahun 2024 realisasi sebesar **89,00** dari target **88,50** dengan capaian **101%**, yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tetap berada pada kategori baik dan melampaui target yang ditetapkan. Setelah lanjut Tahun 2025 tidak dimasukkan dalam Indikator Kinerja Tahun 2025

Pada sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas dengan indikator nilai kinerja LPPD Provinsi, capaian kinerja juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023 realisasi sebesar **3,115** dari target **3,1300** dengan capaian **100%**, sedangkan pada tahun 2024 realisasi meningkat menjadi **3,235** dari target **3,1670** dengan capaian **102%**, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian pada tahun 2025 Nilai LPPD Provinsi Sulawesi Tengah pengampuh Nilainya ditinjau oleh Sekretariat Daerah, berdasarkan Rapat DESK INDIKATOR KINERJA di BAPPEDA PROV.SULTENG,

Kemudian pada **Sasaran meningkatnya kualitas penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah**, Indikator Kinerja persentase pemenuhan kualitas penyusunan LPPD menunjukkan capaian **100%** secara konsisten dari tahun 2023 hingga tahun 2025 yang dilaksanakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Selanjutnya, pada sasaran meningkatnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator persentase data capaian SPM menunjukkan realisasi **90,52** dari target **90,63** pada tahun 2023 dengan capaian **100%**. Pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi menjadi **56,52** dari target **90,65** dengan capaian **62%**, namun pada tahun 2025 kembali mengalami peningkatan signifikan dengan realisasi **99,50%** dari target **91%**, sehingga capaian kinerja mencapai **109%**. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan yang signifikan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Pada sasaran meningkatnya kualitas usulan kajian Daerah Otonomi Baru (DOB) serta meningkatnya kerjasama daerah, seluruh indikator menunjukkan capaian yang konsisten dengan realisasi **100%** dari target yang telah ditetapkan sampai pada tahun 2023 dan 2024, kemudian di tahun 2025 Indikator Kinerja di kebalikan Kajian DOB kepada OPD terkait.

Sementara itu, pada sasaran meningkatnya kepemimpinan daerah dalam melakukan kolaborasi dengan indikator nilai indikator kolaboratif untuk kemajuan daerah, capaian pada tahun 2025 menunjukkan realisasi **75** dari target **75** dengan capaian **100%**, yang menandakan bahwa upaya penguatan kolaborasi dalam kepemimpinan daerah telah berjalan sesuai dengan target yang direncanakan.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja mengalami capaian yang stabil bahkan meningkat, meskipun pada beberapa indikator sempat mengalami penurunan pada tahun tertentu. Namun demikian, pada tahun 2025 kinerja secara umum kembali menunjukkan hasil yang optimal dan mampu memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

C. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Tabel 3.1.3

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2025	TAHUN AKHIR RENSTRA 2027	TAHUN KEMAJUAN
1	Meningkatnya kualitas Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah	Persentas Pemenuhan Kualitas Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah	100	100	100%
2	Meningkatnya Capaian SPM	Persentase Capaian Bidang Urusan SPM	99,50%	92%	92,46%
3	Meningkatnya Kepemimpinan daerah dalam melakukan Kolaborasi	Nilai Indikator Kolaboratif untuk Kemajuan Daerah	75	81	108%

Berdasarkan **tabel perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra**, dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2025 secara umum telah menunjukkan hasil yang baik dan mendekati bahkan melampaui target akhir yang ditetapkan pada tahun 2027. Pada sasaran meningkatnya kualitas penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah dengan indikator persentase pemenuhan kualitas penyusunan LPPD, capaian tahun 2025 telah mencapai **100**, yang sama dengan target akhir Renstra tahun 2027 yaitu **100**, sehingga tingkat kemajuan telah mencapai **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penyusunan LPPD telah memenuhi target jangka menengah yang telah direncanakan.

Selanjutnya, pada sasaran meningkatnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan indikator persentase capaian bidang urusan SPM, realisasi pada tahun 2025 mencapai

99,50%, sementara target akhir Renstra tahun 2027 sebesar **92%**. Dengan demikian, tingkat kemajuan telah mencapai **92,46%**, yang menunjukkan bahwa kinerja dalam pemenuhan SPM telah berada pada jalur yang sangat baik, Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait yang dicapai dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berfokus pada pencapaian pelayanan dasar minimum di beberapa bidang dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan untuk periode akhir Renstra.

Sementara itu, pada sasaran meningkatnya kepemimpinan daerah dalam melakukan kolaborasi dengan indikator nilai indikator kolaboratif untuk kemajuan daerah, capaian pada tahun 2025 sebesar **75**, sedangkan target akhir Renstra tahun 2027 sebesar **81**. Hal ini menunjukkan tingkat kemajuan sebesar **108%**, yang menandakan bahwa upaya peningkatan kolaborasi dalam kepemimpinan daerah terus mengalami perkembangan positif menuju pencapaian target yang telah direncanakan.

Secara keseluruhan, perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang direncanakan, sehingga menggambarkan kinerja yang efektif serta memberikan optimisme terhadap pencapaian target pembangunan daerah hingga akhir periode Renstra tahun 2027.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sulteng memiliki Program dan Kegiatan yang berkaitan Program dan Kegiatan Nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kemudian pada penilaian LPPD Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Tengah masih menunggu hasil dari Kementsrian dalam Negeri tentang hasil Skor Kinerja yang di berikan pada penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan menuju good governance dan clear government serta bercita-cita memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat di berbagai sektor dengan prinsip efektif dan efisien sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. terakhir, Gubernur Sulawesi Tengah menekankan agar perangkat daerah serius melakukan perbaikan dengan memperhatikan

validitas dan akuntabilitas data agar masyarakat bisa merasakan hasil kinerja pemerintah daerah guna mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih Sejahtera dan Maju.

Sementara, Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kementerian Dalam Negeri “Imelda” menuturkan LPPD merupakan laporan wajib yang setiap tahunnya harus diserahkan oleh seluruh kepala daerah dan hasil EPPD Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang 3 tahun terakhir mengalami kenaikan dari peringkat ke 29 mencapai peringkat ke 15 secara Nasional.

Sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan meraih peringkat Ke – 3 LPPD 2023 atas penilaian LPPD 2022. Dua Tahun Berturut turut Makassar Kembali masuk dalam kategori 10 besar Penilaian LPPD.

Tabel Berikut menjelaskan Skor Kinerja LPPD Nasional:

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	1.00 – 1.80	Sangat Rendah
2	1.81 – 2.60	Rendah
3	2.61 – 3.40	Sedang
4	3.41 – 4.20	Tinggi
5	4.21 – 5.00	Sangat Tinggi

**E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN ATAU
PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH
DILAKUKAN**

Tabel 3.1.4
Analisi Penyebab Keberhasilan Tahun 2025

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN
1	Meningkatnya kualitas Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Pemenuhan Kualitas Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah	100	100	100%	meningkatnya kualitas penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah ditunjukkan oleh tercapainya indikator persentase pemenuhan kualitas penyusunan LPPD sebesar 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan LPPD telah dilaksanakan secara optimal melalui koordinasi yang baik antar perangkat daerah, dukungan sumber daya manusia yang memadai, serta pengelolaan data dan pelaporan yang efektif sehingga kualitas laporan dapat terjaga dengan baik.
2	Meningkatnya Capaian SPM	Persentase Capaian Bidang Urusan SPM	91%	99,50%	109%	Keberhasilan pada sasaran meningkatnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditunjukkan oleh realisasi indikator persentase capaian bidang urusan SPM yang mencapai 99,50%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 91% dengan capaian kinerja 109%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan standar pelayanan dasar oleh perangkat daerah telah berjalan sangat baik, didukung oleh peningkatan koordinasi, pemantauan pelaksanaan SPM, serta komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3	Meningkatnya Kepemimpinan daerah dalam melakukan Kolaborasi	Nilai Indikator Kolaboratif untuk Kemajuan Daerah	75	75	100%	Keberhasilan pada sasaran meningkatnya kepemimpinan daerah dalam melakukan kolaborasi ditunjukkan oleh tercapainya indikator nilai indikator kolaboratif untuk kemajuan daerah sebesar 75,

						sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam membangun kerja sama dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan telah berjalan dengan baik, sehingga mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah secara lebih efektif.
--	--	--	--	--	--	---

Berdasarkan tabel **Analisis Penyebab Keberhasilan Tahun 2025**, terdapat tiga sasaran program yang menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik.

Pada sasaran pertama, yaitu **Persentase Pemenuhan Kualitas Penyusunan LPDP Provinsi Sulawesi Tengah**, indikator kinerja berupa persentase pemenuhan kualitas penyusunan LPDP berhasil mencapai **100%** dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa proses penyusunan LPDP telah dilaksanakan secara optimal. Faktor utama yang mendukung capaian ini adalah Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja mencapai target kinerja terhadap Program Pembangunan Daerah, pemenuhan Data Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, pengelolaan anggaran yang mendukung keberhasilan Program Pemerintah, sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terintegrasi dalam Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Perjanjian Kinerja OPD terarah serta pengelolaan Data dan Pelaporan yang akurat, maka dengan kondisi tersebut, kualitas laporan dapat terjaga dengan baik dan memenuhi standar yang diharapkan.

Pada sasaran kedua, yaitu **Persentase Capaian Bidang Urusan SPM**, realisasi capaian mencapai **99,50%**, melampaui target yang ditetapkan sebesar **91%**, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar **109%**. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemenuhan standar pelayanan dasar kepada masyarakat. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait yang dicapai dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berfokus pada pencapaian pelayanan dasar minimum di beberapa bidang penting, yaitu:

1. Pendidikan

- Akses pendidikan dasar bagi semua anak.
- Ketersediaan guru, sarana belajar, dan kualitas pendidikan yang layak.

2. Kesehatan
 - Pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.
 - Imunisasi, pelayanan ibu dan anak, serta penanganan penyakit dasar.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Akses air minum yang layak.
 - Sanitasi dan infrastruktur dasar.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - Rumah layak huni.
 - Penanganan kawasan kumuh.
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - Keamanan lingkungan.
 - Penanganan bencana dan perlindungan masyarakat.
6. Sosial
 - Pelayanan bagi masyarakat miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.

Evaluasi dan monitoring terhadap penginputan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Akhir Tahun 2025, diketahui bahwa tingkat keterisian data pada seluruh bidang pelayanan dasar telah mencapai **100%**, Adapun rincian tingkat keterisian data pada masing-masing bidang pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan : **100%**
2. Bidang Kesehatan : **100%**
3. Bidang Pekerjaan Umum : **100%**
4. Bidang Perumahan Rakyat : **100%**
5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) : **100%**
6. Bidang Sosial : **100%**

Sementara itu, tingkat capaian kinerja pelayanan dasar pada masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan : **99,50%**
2. Bidang Kesehatan : **100%**
3. Bidang Pekerjaan Umum : **100%**
4. Bidang Perumahan Rakyat : **100%**
5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) : **96,67%**
6. Bidang Sosial : **99,79%**

Dengan adanya Data hasil perhitungan terhadap capaian enam bidang pelayanan dasar tersebut, diperoleh **nilai rata-rata capaian sebesar 99,33%**. Dengan nilai tersebut capaian ini

menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat secara optimal sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sementara itu, pada sasaran ketiga, yaitu **meningkatnya kepemimpinan daerah dalam melakukan kolaborasi** indikator di beberapa aspek seperti Kerja Sama antar Pemerintah, Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Kolaborasi dengan Pihak Masyarakat / Akademisi sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja mencapai **100%**. Keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan menunjukkan kemampuan **kepemimpinan daerah dalam membangun kolaborasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan**. Selama periode laporan, pemerintah daerah berhasil menjalin sinergi dengan **pemerintah pusat, antar daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan warga masyarakat**.

Dukungan yang diperoleh meliputi:

1. **Dukungan sumber daya manusia**, berupa tenaga ahli, konsultan, dan program pelatihan bagi aparat pemerintah maupun kader masyarakat, sehingga pelaksanaan program lebih profesional dan efisien.
2. **Dukungan teknis dan fasilitas**, termasuk penyediaan teknologi, sistem informasi, dan peralatan yang mendukung monitoring dan evaluasi program secara real-time.
3. **Dukungan kelembagaan dan koordinasi**, melalui kerja sama lintas OPD, antar-daerah, serta dengan instansi pemerintah pusat untuk menyelaraskan program pembangunan dan menyelesaikan hambatan birokrasi.
4. **Dukungan partisipatif masyarakat**, yang terlihat dari keterlibatan aktif warga, kelompok tani, kader kesehatan, dan organisasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan.

Sinergi yang terjalin dengan baik ini telah memberikan **dukungan yang kuat terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah**, menjadikan kegiatan pembangunan lebih **efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan**. Hasilnya tercermin dalam **peningkatan capaian indikator kinerja daerah**, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKATAN EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	
1	Meningkatnya kualitas Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah	Persentas Pemenuhan Kualitas Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah	100	100	100%	Rp 48.300.000	Rp 48.170.000	100%	0%
2	Meningkatnya Capaian SPM	Persentase Capaian Bidang Urusan SPM	91%	99,50%	109%	Rp 66.757.850	Rp 64.660.986	103%	6%
3	Meningkatnya Kepemimpinan daerah dalam melakukan Kolaborasi	Nilai Indikator Kolaboratif untuk Kemajuan Daerah	75	75	100%	Rp 850.000.000	Rp 847.852.361	100%	0%

Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2025, secara umum Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai telah menunjukkan profesionalisme dan kompetensi yang sangat optimal dalam mengeksekusi program kerja strategis. Indikator pemenuhan kualitas penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah dan nilai kolaboratif kemajuan daerah berhasil diselesaikan dengan tingkat capaian target tepat 100%. Prestasi paling signifikan terlihat pada aspek kapabilitas SDM di bidang urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM), di mana kompetensi pegawai mampu mendorong realisasi kinerja hingga **109% (melebihi target awal 91%)**, dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar **6%**. Hal ini merefleksikan bahwa aparatur tidak hanya bekerja secara terjadwal dan terstruktur, tetapi juga memiliki tingkat produktivitas tinggi dalam mengoptimalkan serapan belanja daerah yang akurat dan efisien.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya merupakan penilaian kualitas antara tingkat capaian kinerja keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) dengan memanfaatkan besaran sumber daya aparatur dan anggaran belanja yang digunakan. Berdasarkan matriks Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

1. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah

- **Capaian Indikator:** Persentase Pemenuhan Kualitas Penyusunan LPPD mencapai **100%** dari target yang ditetapkan.

- **Analisis Efisiensi SDM:** Sumber daya manusia pengelola substansi menunjukkan tingkat **kompetensi teknis yang tinggi** dan kepatuhan regulasi yang ketat. Penyerapan realisasi keuangan sebesar 99,73% (Rp48.170.000 dari pagu Rp48.300.000) menghasilkan nilai capaian persentase anggaran sebesar **100%** dengan tingkat efisiensi **0%**. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi SDM dan beban kerja (*workload*) yang direncanakan telah dihitung secara presisi, akurat, dan tepat guna, sehingga mewujudkan pemanfaatan anggaran yang serasi dengan output fisik yang dihasilkan.

2. Sasaran 2: Meningkatnya Capaian SPM

- **Capaian Indikator:** Persentase Capaian Bidang Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai **109%** (Realisasi kinerja fisik sebesar 99,50% dari target 91%).
- **Analisis Efisiensi SDM:** Pada sasaran ini, produktivitas pegawai berada pada kategori **Sangat Optimal**. Aparatur pelaksana mampu melampaui target kinerja fisik yang direncanakan dengan pemanfaatan realisasi anggaran sebesar 103% (Rp64.660.986 dari pagu Rp66.757.850). Berdasarkan perhitungan formula efisiensi LAKIP, sasaran ini menghasilkan **Tingkat Efisiensi sebesar 6%**. Hal ini mengindikasikan adanya inovasi metode kerja, tingginya komitmen aparatur, serta internalisasi prinsip *Value for Money* oleh pegawai pengelola SPM, di mana eskalasi capaian kinerja berhasil didorong secara signifikan melebihi persentase penyerapan anggarannya.

3. Sasaran 3: Meningkatnya Kepemimpinan Daerah dalam Melakukan Kolaborasi

- **Capaian Indikator:** Nilai Indikator Kolaboratif untuk Kemajuan Daerah mencapai **100%** (Realisasi target fisik bernilai 75 dari target skala 75).
- **Analisis Efisiensi SDM:** Performa SDM pengelola kemitraan dan hubungan antarlembaga mencerminkan **aspek manajerial dan soft skill koordinasi yang matang**. Capaian target fisik 100% diselesaikan secara harmonis dengan capaian serapan anggaran sebesar **100%** (Realisasi Rp847.852.361 dari pagu Rp850.000.000) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi **0%**. Pola ini menunjukkan kestabilan kinerja pegawai yang bertindak sebagai fasilitator kolaborasi, di mana target-target kerja makro berhasil dipenuhi tanpa menimbulkan risiko pemborosan ataupun sisa anggaran belanja operasional yang tidak perlu (*underspending*).

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA									
PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET		Realisasi		Capaian	
				2025		2025		2025	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					2.854.949.272,00		2.837.708.274,00		99,40%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75	1.591.143.172,00	75	1.582.801.221,00	100	99,48%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Biro	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Biro yang Berkualitas	Persentase	100%	34.358.424,00	100%	34.357.900,00	100	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4,00	19.683.424,00	4,00	19.683.300,00	100	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3,00	9.875.000,00	3,00	9.874.750,00	100	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3,00	4.800.000,00	3,00	4.799.850,00	100	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Laporan Administrasi Umum Biro	Persentase Administrasi Umum Biro yang Dilaporkan	Persentase	100%	568.987.498,00	100%	566.527.974,00	100	99,57%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	106.803.249,00	5,00	106.142.622,00	100	99,38%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	3.222.249,00	3,00	3.222.100,00	100	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3,00	458.962.000,00	3,00	457.163.252,00	100	99,61%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilayanani	Persentase	100%	677.125.000,00	100%	674.665.000,00	100	99,64%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2,00	677.125.000,00	2,00	674.665.000,00	100	99,64%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Persentase	100%	310.672.250,00	100%	307.250.347,00	100	98,90%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26,00	310.672.250,00	26,00	307.250.347,00	100	98,90%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Meningkatnya kualitas Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah	Persentas Pemenuhan Kualitas Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase	100%	1.263.806.100,00	100%	1.254.907.053,00	100	99,30%
	Meningkatnya Capaian SPM	Persentase Capaian Bidang Urusan SPM	Persentase	91		91		100	
	Meningkatnya Kepemimpinan daerah dalam melakukan Kolaborasi	Nilai Indikator Kolaboratif untuk Kemajuan Daerah	Nilai	75		75		100	
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Tersedianya Data Dukung LPPD/LKPJ Perangkat Daerah yang dilaporkan	Persentase Data Dukung LPPD/LKPJ yang dilaporkan PD Sesuai Ketentuan	Persentase	100%	190.777.850,00	100%	188.350.986,00	100	98,73%
	Terfasilitasinya usulan urusan penataan Wilayah di tindaklanjuti	Persentase usulan urusan penataan Wilayah di tindaklanjuti	Persentase	100%		100%		100	
	Tersedianya Data Dukung SPM Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase data dukung SPM yang dilaporkan sesuai ketentuan	Persentase	100%		100%		100	
Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	2,00	48.300.000,00	2,00	48.170.000,00	100	99,73%
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	1,00	66.757.850,00	1,00	64.660.986,00	100	96,86%
Fasilitasi Penataan Wilayah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	1,00	75.720.000,00	1,00	75.520.000,00	100	99,74%
Pelaksanaan Otonomi Daerah	Meningkatnya Fasilitas Adm. KDH Dan DPRD Provinsi dan Kab/Kota	Persentase Kebutuhan Adm. Pengangkutan, Pemberhentian, Paw Dan Izin Alasan Penting Kdh dan DPRD baik Prov, Kab/Kota Yang diterbitkan	Persentase	100%	222.985.000,00	100%	218.703.706,00	100	98,08%
	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Otda Kab/Kota	Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Otda Kab/Kota	Persentase	100%		100%		100	
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Kab/Kota yang Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerahnya Meningkat (Nilai LPPD Kab/Kota)	Persentase	100%		100%		100	
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	1,00	39.176.000,00	1,00	35.373.875,00	100	90,29%
Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	1,00	43.270.000,00	1,00	43.206.611,00	100	99,85%
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	1,00	140.539.000,00	1,00	140.123.220,00	100	99,70%
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Meningkatnya Kualitas kerjasama daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang telah dilaksanakan	Persentase	100%	850.043.250,00	100%	847.852.361,00	100	99,74%
Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah		Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Laporan	1,00	708.661.450,00	1,00	706.929.868,00	100	99,76%
Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta		Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Laporan	1,00	49.307.350	1,00	48.971.389	100	99,32%
Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama		Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	1,00	92.074.450	1,00	91.951.104	100	99,87%

Tabel tersebut menggambarkan rencana kegiatan, target kinerja, serta realisasi capaian yang telah dilaksanakan dalam periode pelaporan. Setiap kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi melalui indikator kinerja yang terukur. Indikator tersebut dinyatakan dalam berbagai satuan, seperti jumlah kegiatan, dokumen, laporan, maupun persentase pelaksanaan program. Penetapan target pada setiap indikator menjadi acuan dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Berdasarkan data pada tabel, sebagian besar kegiatan menunjukkan tingkat realisasi yang mendekati atau bahkan mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan secara efektif dan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Capaian yang tinggi pada beberapa indikator mencerminkan adanya perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antar unit kerja, serta komitmen dalam melaksanakan setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing bidang.

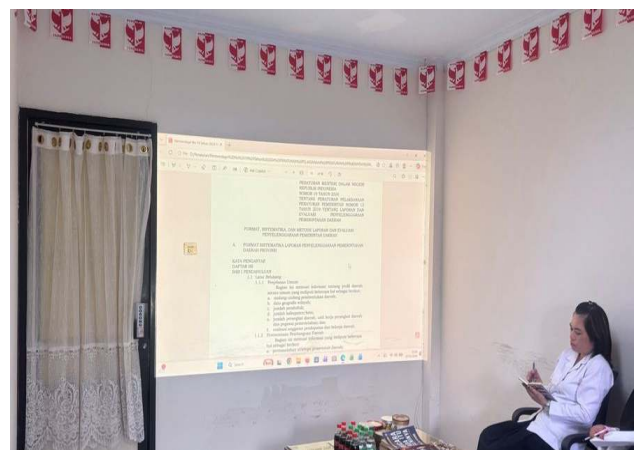
Selain itu, kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan program, pengelolaan administrasi, serta penyusunan laporan juga menunjukkan capaian yang cukup baik. Realisasi yang diperoleh menggambarkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan tidak hanya berfokus pada pencapaian kuantitas, tetapi juga pada pemenuhan standar pelaksanaan yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Meskipun secara umum capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang positif, tetap diperlukan proses monitoring dan evaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan kegiatan serta menemukan solusi yang tepat agar pelaksanaan program pada periode berikutnya dapat berjalan lebih optimal. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan kualitas pelaksanaan kegiatan dapat terus meningkat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pada periode pelaporan dapat dikategorikan berjalan dengan baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan berhasil dicapai dengan tingkat realisasi yang tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan telah memberikan hasil yang optimal dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Dengan mempertahankan kinerja yang baik serta terus melakukan perbaikan, diharapkan pencapaian kinerja pada periode selanjutnya dapat semakin meningkat.

BAGIAN PEMERINTAHAN

KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FASILITASI PENATAAN WILAYAH



Rapat Internal Bagian Pemerintahan dalam tentang
Penyusunan Dokumen LPPD dan LKPJ Tahun 2025



Saat menghadiri kegiatan optimalisasi dan tata kelola Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Tengah yang diinisiasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah di ruang Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Selasa (11/06/2025).



Pada pelaksanaan Sosialisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 yang diikuti OPD Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Tengah.



Telah disusun dan disampaikan kepada Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri pada Triwulan 1 tahun 2025, sedangkan ringkasan LPPD Tahun 2024 telah disampaikan kepada Masyarakat.

SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Pada peningkatan Capaian SPM di buatlah Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penyusunan dan Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2025. Untuk meningkatkan Indikator Persentase Capaian SPM Provinsi Sulawesi Tengah. Maka pelaksanaan tersebut di Bimbing oleh Pemateri dari Kementerian Dalam negeri.



BAGIAN KERJASAMA

Adapun peningkatan pelayanan Biro Pemerintahan dan otonomi daerah melaksanakan penandatanganan kesber antara Pemprov. Sulteng dgn yayasan pendidikan keluarga Kadarisman.



Penandatanganan Kerjasama (Mou) Pemerintah Daerah Dengan Pt Telkomsel Di Polibu



RAPAT KERJASAMA PEMERINTAHAN DAERAH DAN BANK MANDIRI CABANG SULTENG



3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dari anggaran APBD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 yang memaparkan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bidang Keuangan yang membandingkan antara Anggaran Dan Realisasi Dari Pencapaian Program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang menggambarkan Akuntabilitas Keuangan yang dikelola oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel dibawah ini tersebut menggambarkan rencana kegiatan, target kinerja, serta realisasi capaian yang telah dilaksanakan dalam periode pelaporan. Setiap kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi melalui indikator kinerja yang terukur. Indikator tersebut dinyatakan dalam berbagai satuan, seperti jumlah kegiatan, dokumen, laporan, maupun persentase pelaksanaan program. Penetapan target pada setiap indikator menjadi acuan dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Berdasarkan data pada tabel, sebagian besar kegiatan menunjukkan tingkat realisasi yang mendekati atau bahkan mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan secara efektif dan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun

sebelumnya. Capaian yang tinggi pada beberapa indikator mencerminkan adanya perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antar unit kerja, serta komitmen dalam melaksanakan setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing bidang.

Selain itu, kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan program, pengelolaan administrasi, serta penyusunan laporan juga menunjukkan capaian yang cukup baik. Realisasi yang diperoleh menggambarkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan tidak hanya berfokus pada pencapaian kuantitas, tetapi juga pada pemenuhan standar pelaksanaan yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Meskipun secara umum capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang positif, tetap diperlukan proses monitoring dan evaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan kegiatan serta menemukan solusi yang tepat agar pelaksanaan program pada periode berikutnya dapat berjalan lebih optimal. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan kualitas pelaksanaan kegiatan dapat terus meningkat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pada periode pelaporan dapat dikategorikan berjalan dengan baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan berhasil dicapai dengan tingkat realisasi yang tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan telah memberikan hasil yang optimal dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Dengan mempertahankan kinerja yang baik serta terus melakukan perbaikan, diharapkan pencapaian kinerja pada periode selanjutnya dapat semakin meningkat.

PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.854.949.272,00	2.837.708.274,00	99,40%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.591.143.172,00	1.582.801.221,00	99,48%

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.358.424,00	34.357.900,00	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.683.424,00	19.683.300,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.875.000,00	9.874.750,00	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.800.000,00	4.799.850,00	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	568.987.498,00	566.527.974,00	99,57%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.803.249,00	106.142.622,00	99,38%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.222.249,00	3.222.100,00	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	458.962.000,00	457.163.252,00	99,61%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	677.125.000,00	674.665.000,00	99,64%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	677.125.000,00	674.665.000,00	99,64%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.672.250,00	307.250.347,00	98,90%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.672.250,00	307.250.347,00	98,90%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.263.806.100,00	1.254.907.053,00	99,30%
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	190.777.850,00	188.350.986,00	98,73%
Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	48.300.000,00	48.170.000,00	99,73%
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	66.757.850,00	64.660.986,00	96,86%
Fasilitasi Penataan Wilayah	75.720.000,00	75.520.000,00	99,74%
			98,08%

Pelaksanaan Otonomi Daerah	222.985.000,00	218.703.706,00	
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	39.176.000,00	35.373.875,00	90,29%
Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	43.270.000,00	43.206.611,00	99,85%
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	140.539.000,00	140.123.220,00	99,70%
Fasilitasi Kerjasama Daerah	850.043.250,00	847.852.361,00	99,74%
Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	708.661.450,00	706.929.868,00	99,76%
Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	49.307.350	48.971.389	99,32%
Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	92.074.450	91.951.104	99,87%

Keterangan Tabel:

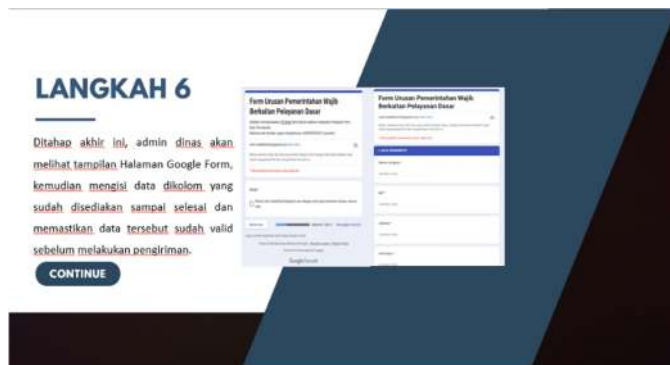
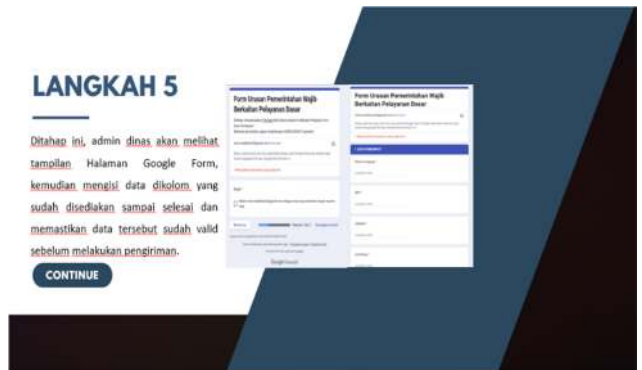
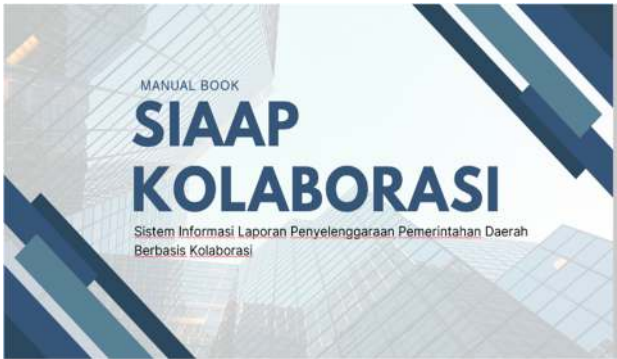
Tabel di atas menyajikan informasi mengenai rencana kegiatan, sasaran kinerja, indikator kinerja, satuan pengukuran, target yang ditetapkan, realisasi pelaksanaan, serta persentase capaian dari setiap kegiatan pada periode pelaporan. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan sejauh mana kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Persentase capaian kinerja menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan serta sebagai dasar evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

3.3 INOVASI

Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Kolaborasi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebuah platform atau sistem yang dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola, menyusun dan melaporkan kinerja pemerintahan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sistem ini juga bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam integrasi data melalui sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (SILPPD) Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini dikelola oleh Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan dukungan dari instansi terkait lainnya:

Tabel Daftar Inovasi 2025 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	NAMA INOVASI	URAIAN INOVASI	DAMPAK INOVASI
1.	SISTEM INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (SIAPP KOLABORASI)	Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Kolaborasi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebuah platform atau sistem yang dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola, menyusun dan melaporkan kinerja pemerintahan sesuai dengan regulasi yang berlaku	Dengan adanya sistem informasi ini semoga dapat bermanfaat serta membantu Pemerintah dalam mengelola, menyusun dan melaporkan kinerja pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah



3.4 PENGHARGAAN

PENGHARGAAN KINERJA TERBAIK

Pertama Kalinya Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan Penghargaan SPM Awards 2025 (Standar Pelayanan Minimal) Jakarta, 23 Mei 2025.

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri menggelar Acara Penghargaan SPM Awards 2025 pada penerapan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi, Kabupaten/Kota Se Indonesia.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat 1 bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum & penataan ruang, Perumahan rakyat & kawasan pemukiman, Trantibumlinmas dan Sosial).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Bpk. Drs. Jenderal Muhammad Tito Karnavian M.A.,Ph.D memberikan penghargaan kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ibu dr. Reny A. Lamadjido,Sp.PK.,M.Kes atas *Kinerja Terbaik Provinsi Regional Sulawesi* pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024.

Adapun kategori penghargaan diantara:

1. Daerah berkinerja terbaik
2. Daerah masing-masing regional berkinerja terbaik
3. Daerah Kepulauan berkinerja terbaik
4. Daerah Provinsi paling aktif melakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kota nya

Demikian disampaikan. Terima Kasih

Bagian Pemerintahan, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.



BAB IV

PENUTUP

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyadari di balik berbagai upaya yang dilakukan, banyak tantangan yang masih dihadapi untuk benar benar memenuhi seluruh ekspektasi tentang pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai evaluator mulai dari proses perencanaan sampai kepada proses pelaporan kinerja, yang bertujuan meningkatkan nilai komponen evaluasi kinerja internal

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Laporan Kinerja dari 2 (dua) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp 2.854.949.272**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan pada capaian kinerja tahun 2025 pada sasaran yang sesuai dengan "Meningkatnya Kerjasama Daerah" dengan indikator kinerja "Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti" pencapaian sasaran ini sudah dapat di penuhi dengan tingkat capaian kinerja 100%.

1. Indikator Kinerja Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah bahwa perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Tahun 2025 ini bahwa target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap rencana strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tercapai target RENSTRA yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja sesuai dengan target RENSTRA.
2. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sepanjang tahun 2025 telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian sangat baik yang terlihat dari rata-rata capaian serapan anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebesar 99,40% dan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% .
3. Capaian realisasi anggaran berada diatas rata-rata nilai 99% sampai dengan 99%
4. Inovasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Kolaborasi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebuah platform atau sistem yang dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola,

menyusun dan melaporkan kinerja pemerintahan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sistem ini juga bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam integrasi data melalui sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (SILPPD) Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini dikelola oleh Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SARAN DAN STRATEGI TINDAK LANJUT LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2025.

- Memperbaiki kualitas laporan kinerja.
- Memanfaatkan informasi laporan kinerja untuk perencanaan periode berikutnya.
- Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.
- Analisis efisiensi penggunaan anggaran.
- Menyusun dan menetapkan SOP atau pedoman teknis pengukuran kinerja.
- Menyelenggarakan evaluasi kinerja.
- Melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki atau mengoptimalkan kinerja.

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhai tugas pengabdian kita sekalian pada Bangsa dan Negara.

Palu, 16 Januari 2026

Pt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH



MOHAMMAD AZIR, S.STP., M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 19770822 199511 1 001

